

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dan kesuksesan sistem syariah terutama dalam ekonomi telah membuat masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap ekonomi syariah. Indonesia juga merupakan negara dimana terus bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, tidak hanya berpusat pada bank. Semakin lengkapnya elemen lembaga keuangan syariah ditandai juga dengan kemunculan Baitul Maal wat Tamwil.¹

Munculnya lembaga keuangan seperti Baitul Maal wat Tamwil merupakan fenomena aktual yang menarik untuk dicermati. Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dinilai mempunyai potensi besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Peneliti Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Fakultas Ekonomi UII Priyonggo Suseno mengatakan BMT merupakan lembaga keuangan yang lahir dari masyarakat dan banyak memberi sumbangsih untuk mereka.²

Perlambatan ekonomi dan pelemahan kurs rupiah dinilai tak berpengaruh pada bisnis Baitul Maal Wat Tanwil (BMT), bahkan sebaliknya justru meningkat. Ketua Asosiasi BMT se-Indonesia Aries Mufti mengatakan, aktivitas BMT meningkat di tengah lesunya perekonomian.

¹ Bustamam., Ibrahim, Ridwan., Saputra Dedy. "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh", *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Maret 2015, 2, hal. 82-91

² Rima. "BMT Bisa Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat". *Rima News*. 12 Juni 2014

"Bisnis BMT itu kan bisnis di kalangan orang bawah, jadi orang di bawah justru bertambah, pengaruhnya malah minjem ke BMT meningkat," jelasnya kepada *Republika.co.id*. Ia menjelaskan, orang di bawah bertambah karena banyak perusahaan melakukan PHK. "Biasanya mereka yang diPHK, mulai bekerja menjadi pengusaha, maka pinjam uang ke BMT, sektor usaha mikro dan kecil (UMK) meningkat juga," tambahnya.³

Menurut Heri Sudarsono (2014:101) BMT terdiri dari dua istilah yaitu *baitul māl* dan *baitul tamwil*. *Baitul māl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan *shodaqoh* serta menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁴

Praktik akuntansi dalam hal lembaga keuangan syariah pun mutlak diperlukan, dalam hal ini praktik akuntansi syariahlah yang mengambil peran. Seiring dengan melaju kencangnya praktik akuntansi syariah yang dibuktikan dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia kearah tren yang membanggakan, sangat penting rasanya ada aturan-aturan baku yang diterima secara umum.

Peraturan KEMENKOP Nomor. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi mengharuskan BMT melaksanakan kegiatan operasional dan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK. Walaupun harus dicatat sesuai dengan

³ Ahad. "Perekonomian Nasional Melambat, Bisnis BMT justru Meningkat". *Republika*. 20 September 2015

⁴ Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2014

aturan yang ada, lembaga keuangan syariah melarang akan adanya penerimaan dan pembayaran bunga, karena dalam Islam bunga bank hukumnya haram. Seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah termasuk laporan keuangannya harus berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah yang telah ditetapkan berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan telah disesuaikan dengan kaedah akuntansi oleh komite khusus Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).⁵

Ikatan Akuntan Indonesia pun sejauh ini telah menerbitkan sembilan standar terkait dengan Akuntansi syariah, yaitu PSAK 101 (penyajian laporan keuangan syariah), PSAK 102 (murabahah), PSAK 103 (salam), PSAK 104 (isthisna'), PSAK 105 (mudharabah), PSAK 106 (musyarakah), PSAK 107 (ijarah), PSAK 108 (penyelesaian hutang piutang murabahah bermasalah), PSAK 109 (zakat, infak, sedekah). Lembaga keuangan syariah beberapa waktu ini terbukti banyak telah mendongkrak kesejahteraan masyarakat dengan mekanisme sistem yang diterapkannya. Hal inilah yang membuat banyak masyarakat mulai beralih ke sistem syariah sebagai alternatif, baik dalam peminjaman pembiayaan permodalan usaha, simpan, pinjam, dan penyaluran zakat.

BMT dalam hal ini berkepentingan menyajikan laporan keuangan yang memadai secara baik, sebab laporan keuangan dipergunakan oleh berbagai pengguna dengan beberapa kepentingannya. Tujuan dari laporan keuangan

⁵ Naimah, Umi Fauzul., Ridwan, Murtadho. "Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT "X" Kudus", *Iqtishadia*. Maret 2014, 7, hal. 59-84

tersebut antara lain adalah kepatuhan lembaga keuangan syariah termasuk BMT terhadap prinsip syariah. Penerapan akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah juga memerlukan independensi dari Badan Pengawas Internal lembaga untuk melakukan pengawasan kegiatan operasional agar penyajian laporan keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban.⁶

Penyajian laporan keuangan syariah ini sepenuhnya didasarkan pada PSAK 101 yang bertujuan mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan. Perlunya penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK 101 adalah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah yang lain. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pihak internal maupun eksternal yang menggunakan laporan keuangan tersebut.

Walaupun sudah diatur jelas dalam peraturan tentang penerapan PSAK dalam kegiatan operasional dan pelaporan keuangan BMT, masih banyak saja BMT yang tidak menerapkan PSAK dalam kegiatan operasional dan pelaporan keuangannya. Ada beberapa penelitian yang telah membuktikan masih banyaknya BMT yang tidak menerapkan PSAK 101, diantaranya BMT yang terletak di Kudus, Aceh, Solo, Pekanbaru dll. Hal ini biasanya disebabkan oleh kecenderungan BMT yang merasa kesulitan dan

⁶ Suwiknyo, Dwi. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pusaka Belajar, 2010

menganggap penerapan PSAK tidak memiliki *benefit* yang berarti dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini juga mungkin disebabkan oleh kurangnya *monitoring* yang intensif dari KEMENKOP.

Selain penyajian laporan keuangan yang harus sesuai dengan PSAK 101, BMT juga harus mengukur kinerja usahanya. Hal ini sangat penting guna mengetahui tingkat kesehatan keuangan, maka pengukuran kinerja keuangan perlu dilakukan pada tiap akhir periode tertentu, dan ini merupakan salah satu tindakan penting yang harus dilakukan oleh BMT guna mengetahui prestasi dan keuntungan yang dicapainya melalui indikator-indikator pengukuran tingkat kesehatan keuangan dengan harapan BMT beroperasi secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penilaian kesehatan koperasi mencakup permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan kemandirian, jatidiri koperasi dan prinsip syariah. Menurut peraturan Menteri Koperasi Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Kesehatan Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi dimana Koperasi dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.⁷

Pada kesempatan kali ini, penulis akan menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan dari BMT X. Selain menganalisis kesesuaian

⁷ Afandi, Pandi. "Analisis Kinerja Keuangan untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Koperasi KSU BMT Arafah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang", *Among Makarti*. Juli 2014, 7, hal. 13

penyajian laporan keuangan, penulis juga akan mengukur kinerja keuangan BMT X. Maka dari itu penulis mengambil judul: “**Analisis Penerapan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Kinerja Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT X)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang diangkat sesuai dengan hal diatas adalah :

1. Bagaimana penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada BMT X?
2. Bagaimana analisis kinerja keuangan syariah pada BMT X ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang penyajian laporan keuangan pada BMT X apakah sudah sesuai atau belum dengan PSAK 101 yang telah dijadikan standar dan penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan syariah dari BMT X.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep penyajian laporan keuangan syariah dan pengukuran kinerja keuangan syariah bagi pengembangan ilmu ekonomi islam pada umumnya dan keuangan islam pada khususnya serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya tentang penerapan PSAK No. 101 dan pengukuran kinerja keuangan syariah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan syariah dan pengukuran kinerja keuangan syariah. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi BMT X maupun pihak yang terkait di dalamnya dalam menerapkan penyajian laporan keuangan dan pengukuran kinerja keuangan syariah.